

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kemunculan program Open Data Keuangan Desa menjadi jawaban atas besarnya amanah pengelolaan dana desa yang diemban oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Secara umum program Open Data Keuangan Desa memiliki tujuan untuk menyediakan akses masyarakat terhadap perencanaan pembangunan dan memberikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut sesuai dengan konsep atau teori Korten yang digunakan dalam penelitian ini dimana implementasi program Open Data Keuangan Desa harus menyesuaikan terhadap kebutuhan partisipasi dan tuntutan transparansi dari pemanfaat program atau masyarakat serta kompetensi pengelolaan anggaran dan putusan dalam bentuk tertib dan disiplin anggaran dari organisasi pelaksana program dalam hal ini pemerintah desa, sehingga program tersebut benar-benar dilaksanakan secara sistematis dengan konsep yang matang.

#### **1. Model Kesesuaian Implementasi Program**

##### **a. Kesesuaian antara Program dengan Kelompok Pemanfaat**

Unsur yang *pertama* dalam melihat implementasi program Open Data Keuangan Desa adalah adanya kesesuaian antara program dengan kelompok pemanfaat, artinya masyarakat sebagai kelompok pemanfaat benar-benar mendapatkan manfaat berupa hasil atau output dari

implementasi program tersebut. Dalam unsur ini kesesuaian ditunjukkan dari terbukanya informasi mengenai pembangunan dan pengelolaan keuangan desa bagi seluruh masyarakat dengan cara mengakses situs [datadesa.wonosobokab.go.id](http://datadesa.wonosobokab.go.id) untuk dapat memantau informasi pembangunan desa secara langsung atau *real time*, tanpa adanya batasan waktu maupun untuk kalangan elit atau masyarakat biasa.

**b. Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana**

Unsur *kedua* adalah adanya kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana atau bisa dipahami bahwa pelaksanaan program harus sesuai dengan kemampuan organisasi pelaksana, sehingga tujuan dari implementasi program dapat dicapai sesuai dengan misi program tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya serangkaian proses yang harus dilalui oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasikan program Open Data Keuangan Desa seperti pengadaan regulasi pendukung program, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyiapan *help desk* atau pusat data baik dalam bentuk *software* maupun *hardwer* untuk menampung data terintegrasi.

**c. Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dengan Organisasi Pelaksana**

Unsur yang *ketiga* adalah adanya kesesuaian antara kelompok pemanfaat dan organisasi pelaksana dalam implementasi program Open Data Keuangan Desa yang ditunjukkan melalui adanya prosedur-prosedur tertentu bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam program tersebut.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menerapkan strategi khusus untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada platform Open Data Keuangan Desa melalui pelibatan partisipasi pemuda yang dinilai dekat dengan pemanfaatan teknologi.

## **2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

### **a. Transparansi**

Dari segi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa program Open Data Keuangan Desa berhasil mewujudkan proses transparansi melalui tersajinya dokumen-dokumen pembangunan dan pengelolaan keuangan desa seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan laporan realisasi anggaran pada platform Open Data Keuangan Desa. Selain itu, untuk mengoptimalkan transparansi pengelolaan keuangan desa dari pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga mengintruksikan pemerintah desa agar membuat baliho APBDes atau yang dikenal dengan istilah Open Data Manual. Hal tersebut diupayakan untuk menjawab permasalahan pada masyarakat yang belum dapat mengakses Open Data Keuangan Desa secara online.

### **b. Partisipasi**

Proses partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa melalui platform Open Data Keuangan Desa dilihat dari adanya masyarakat yang dapat memberikan komentar maupun masukan terhadap pembangunan desa serta melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan mekanisme atau prosedur pengaduan masyarakat yang telah diatur.

### **c. Tertib dan Disiplin Anggaran**

Tertib dan disiplin anggaran menjadi poin ketiga yang dicapai dalam implementasi program Open Data Keuangan Desa ditunjukkan melalui mekanisme kegiatan pelaporan keuangan yang sistematis serta proses audit yang lebih teratur dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap pemerintah desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi lebih berkualitas. Melalui proses tersebut pengawasan anggaran pada pemerintah desa diwujudkan dengan adanya evaluasi dan verifikasi oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten.

Secara garis besar implementasi program Open Data Keuangan Desa telah menjadi suatu jalan baru yang inovatif untuk menyelesaikan urusan keterbukaan informasi publik bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sehingga meminimalisir tindakan-tindakan korupsi, kolusi, maupun nepotisme dari aparatur pemerintahan yang mengelolan jalannya pemerintahan desa. Open Data Keuangan Desa menjadi suatu platform yang tidak diamanahkan dalam UU Desa sehingga pada pelaksanaannya pemerintah desa sempat menolak karena belum mengerti, namun setelah dijelaskan bahwa program tersebut merupakan gerakan kebaikan untuk mencapai transparansi pemerintahan desa maka dari situlah mulai terjadi perubahan pola pikir mengenai pengelolaan anggaran desa ke arah yang lebih baik, bahkan pada beberapa desa di Kabupaten Wonosobo yang pemerintahannya masih dikelola secara kurang terbuka. Meskipun demikian, dalam mengimplementasikan suatu program sehingga dapat

dinyatakan berhasil salah satu faktor penentu utamanya adalah kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam program Open Data Keuangan Desa ada dua yaitu pelaksana program atau pemerintah desa dan pemanfaat atau masyarakat.

## 2. **Faktor Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program**

### **Faktor Pendukung:**

- a. Adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo selaku implementator program dalam memudahkan cara aparat desa untuk melakukan pelaporan anggaran pada pengelolaan keuangan desa dengan adanya forum diskusi online selama 24 jam melalui grup WhatsApp yang dikelola secara langsung oleh sub bagian keuangan dan aset desa. Upaya lainnya yang dilakukan adalah pelayanan hardisk eksternal dari Diskominfo Kabupaten Wonosobo selama jam kerja untuk mengatasi masalah perangkat keras maupun data error pada program Open Data Keuangan Desa. Adanya informasi maupun petunjuk dari Infest Yogya mengenai perkembangan software dan berbagai macam cara penggunaan fitur pada aplikasi mitra desa yang dapat diakses melalui situs [mitradesa.id](http://mitradesa.id).
- b. Adanya ketetapan terhadap koordinasi antara pelaksana program dengan sub program yang ditunjukkan melalui kejelasan mengenai alur koordinasi antara program dengan sub program yang dimaksud adalah antara pemerintah kabupaten sebagai implementator program dalam hal ini bertindak untuk mengkoordinir pelaksanaan program serta melakukan

pemantauan server berupa tindakan koreksi dan verifikasi pada dokumen pembangunan maupun keuangan desa dan pemerintah desa sebagai pelaksana program harus menggunakan aplikasi mitra desa untuk mengunggah dokumen pembangunan dan keuangan desa. Kemudian Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen dari pemerintah desa. Data yang telah diolah dan diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten diintegrasikan pada dashboard [opendata.wonosobokab.go.id](http://opendata.wonosobokab.go.id). sehingga masyarakat dapat mengaksesnya secara terbuka.

**Faktor Penghambat:**

- c. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan kualitas literasi teknologi masyarakat Kabupaten Wonosobo sampai dengan skripsi ini ditulis masih cenderung sangat rendah. Hal demikian rata-rata terjadi di desa-desa sehingga mengakibatkan belum adanya masyarakat yang berpartisipasi menggunakan platform Open Data Keuangan Desa untuk memberikan aspirasinya. Selain itu hambatan dari kualitas sumber daya pada beberapa desa yang masih belum punya penguasaan teknologi dasar yang cukup untuk melaksanakan perubahan kegiatan pengelolaan keuangan dari manual menjadi digital, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah desa diperbolehkan merekrut tenaga admin dari luar perangkat desa untuk melaksanakan program Open Data Keuangan Desa.
- d. Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi keuangan desa yang dilihat dari beberapa desa masih mengalami hambatan seperti perangkat

keras yang standar atau spesifikasi rendah sehingga kadang-kadang mempersulit kinerja admin program open data. Sedangkan untuk akses internet hambatan yang dihadapi adalah beberapa desa masih mengandalkan tethering atau hotspot dari perangkat pintar seperti android karena tidak adanya jaringan internet atau wifi pada kantor pemerintah desa.

## **B. Saran**

1. Minimnya partisipasi masyarakat dalam platform Open Data Keuangan Desa menjadi poin serius yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo karena salah satu penentu keberhasilan program tersebut adalah partisipasi masyarakat itu sendiri sehingga proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat lebih ditingkatkan. Pelaksanaan sosialisasi yang lebih masif menjadi solusi atau cara untuk dapat ikut melibatkan masyarakat dalam program tersebut. Namun karena adanya realitas bahwa tidak semua masyarakat desa mengerti terhadap penggunaan teknologi, maka perlu diadakannya segmentasi sasaran masyarakat penerima sosialisasi program Open Data Keuangan Desa, seperti yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan menggandeng Duta GenRe dari kalangan pelajar karena dinilai lebih mudah menerima informasi pemanfaatan teknologi. Meskipun demikian perlu diperhatikan agar segmen pemuda yang menjadi sasaran utama sosialisasi program tersebut juga menggandeng para orang tua dan

anggota keluarganya yang tidak mengerti teknologi untuk menyampaikan aspirasi pembangunan pada platform Open Data Keuangan Desa melalui pemuda tersebut.

2. Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menyosialisasikan program Open Data Keuangan Desa perlu untuk menyusun strategi-strategi khusus yang dinilai efektif untuk mengenalkan program tersebut terhadap masyarakat karena realitas yang ditemukan dalam penelitian ini Kabupaten Wonosobo adalah wilayah dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi dan banyaknya kualitas masyarakat desa yang belum melek teknologi. Mengingat Kabupaten Wonosobo adalah wilayah yang cukup kaya akan budaya, maka hal tersebut dapat dilaksanakan dengan menggandeng pemerintah desa agar memasang baliho pengenalan program Open Data Keuangan Desa pada setiap acara-acara desa yang sering diadakan.